

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DITINJAU DARI KELEMBAGAAN

Sri Wahyuningsih

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim

Abstrak

Agribisnis merupakan suatu system yang terdiri dari sub system, dari mulai pengadaan sarana produksi sampai pemasaran hasil olahan. Jenis usaha dalam bidang agribisnis juga sangat beragam dan ukurannya juga bervariasi. Dari kondisi ini mengakibatkan banyak lembaga yang terlibat untuk menagani. Dukungan kelembagaan agribisnis ini sangat dibutuhkan dan kemajuan agribisnis sangat dipengaruhi oleh peran serta lembaga pendukung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kelembagaan agribisnis agar dapat mendorong keberhasilan agribisnis. Untuk mengetahui bagaimana aspek kelembagaannya ditinjau dari social ekonomi kelembagaan tersebut, baik aspek social ekonomi pelaku agribisnis, penerapan pola PIR dalam pengembangan agribisnis dan kebijakan pemasaran.

Hasil dan kesimpulannya adalah ada banyak lembaga yang terlibat dalam agribisnis. Untuk mengerakkan dan memajukan agribisnis semua lembaga harus berperan secara aktif sinergis dan saling terkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan efisiensi dapat dicapai. Pelaku agribisnis juga ada beberapa bila dikelompokkan ada tiga yaitu BUMN, Swasta, dan Koperasi. Ukuran pelaku agribisnis juga beragam ada yang kuat ada yang lemah. Sehingga untuk mendorong agribisnis berkembang berkelanjutan, produktif dan efisien maka semua pelaku agribisnis harus ada prana dalam menagani kegiatan agribisnis. Etika moral dan tujuan jangka panjang yang harus diutamakan untuk agribisnis yang berkelanjutan.

Pendahuluan

Agribisnis memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Diperkirakan 29 persen dari Gross Domestic Product (GDP) bersumber dari sektor agribisnis. Selain mempunyai peluang untuk diekspor, produk agribisnis juga mempunyai demand yang cukup tinggi di pasar dalam negeri. Sebagai contoh, tingkat permintaan akan produk

pangan yang memiliki nilai tambah, karena sudah diproses lebih lanjut, mengalami kenaikan rata-rata enam persen per tahun.

Kemajuan yang dialami di sektor agribisnis tidak terlepas dari dukungan kelembagaan agribisnis. Cakupan agribisnis yang begitu luas, melibatkan cukup banyak lembaga untuk menanganinya, beberapa diantaranya ialah lembaga perbankan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, pergudangan, penelitian, pendidikan, penyuluhan serta lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Secara umum kegiatan agribisnis perlu dilakukan secara terpadu. Namun kegiatan agribisnis masih terkotak-kotak. Misalkan yang memproduksi bahan baku adalah DIPERINDAG, serta masalah keamanan makanan dan minuman diatur oleh departemen kesehatan sehingga masih sulit koordinasinya. Padahal agribisnis adalah satu rangkaian kegiatan yang menyeluruh.

Cakupan agribisnis yang cukup luas, melibatkan banyak lembaga, dimana agribisnis mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pada kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan usahatani atau produk lain. Dengan demikian agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari (1) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, (2) subsistem usahatani, (3) subsistem pengolahan hasil pertanian, dan (4) subsistem pemasaran. Karena merupakan sistem dimana setiap subsistemnya banyak lembaga yang terkait, maka keterkaitan antar subsistem tersebut sangat erat. Keberhasilan agribisnis tergantung pada kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai di setiap subsistemnya.

Dari latar belakang tersebut, yang menjadi masalah adalah bagaimana kelembagaan tersebut agar dapat mendorong keberhasilan agribisnis? Bagaimana aspek kelembagaannya ditinjau dari social ekonomi kelembagaan tersebut, baik aspek social ekonomi pelaku agribisnis, penerapan pola PIR dalam pengembangan agribisnis dan kebijakan pemasaran?

Pembahasan

A. Struktur Kelembagaan Agribisnis

Sumber daya alam, manusia, kapital dan teknologi merupakan syarat keharusan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak merupakan syarat kecukupan dari upaya pembangunan. Tersedianya perangkat kelembagaan merupakan syarat kecukupan, karena dengan

perangkat kelembagaan sumber daya dapat dialokasikan dan dimobilisasi secara optimal.

Pengertian lembaga dan organisasi sering diartikan sama yaitu wadah dimana individu secara kolektif dengan seperangkat aturan main melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kelembagaan atau sering dikatakan sebagai kepranataan-asal kata pranata. (Kuncaraningrat, Prasudi, dan lain-lain cit Chrisman Silitonga, 1995) adalah sesuatu yang berakar dalam norma yang mengarah dan mengatur pelaku sosial dalam bermasyarakat atau segala sesuatu yang sudah dikukuhkan masyarakat (Mc.Iver cit Christian Silitonga, 1995).

Kelembagaan fisik dan non fisik di bidang agribisnis adalah perangkat pembangunan yang menghimpun pelaku diatas landasan relatif untuk mencapai sasaran baik untuk skala lokal, regional maupun ekspor. Hal terakhir perlu memperoleh tekanan karena hampir tidak ada agribisnis yang ditujukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan daerah dimana ia berlokasi. Sebagian besar kegiatan agribisnis meliputi agroindustri tergolong off-farm. Oleh karena itu kegiatan agroindustri sebagai sub elemen dari industrialisasi pedesaan diharapkan mampu sebagai wahana transporansi ekonomi pertanian ke ekonomi industri atau dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.

Kenyataan diatas melahirkan pertanyaan, misi atau tindakan apa yang harus diperankan oleh lembaga formal dan inormal, baik normatif maupun positif di pedesaan untuk mendorong atau setidaknya menciptakan iklim kondusif untuk mengerakkan kegiatan agribisnis.

Ada kecenderungan anggapan bahwa Industrialisasi lewat kegiatan agribisnis sering dianggap sekedar sebagai perwujudan "jalur kesempatan berusaha dan lapangan kerja" desa-kota ketimbang sebagai instrumen pertumbuhan. Oleh karena itu pembentukan agroindustri di pedesaan sering terbatas dan hanya dilihat dalam bentuk industri kecil dan rumah tangga, bukan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi modern. Disini akan kita tinjau satu per satu mengenai kelembagaan yang ada dalam agribisnis.

A.1. Lembaga Perkreditan

Untuk mengembangkan agribisnis perlu adanya dukungan modal dari lembaga perkreditan. Kendala yang sering dialami dalam usaha agribisnis adalah kurangnya modal atau investasi perbankan. Investasi ini sangat menentukan bagi pengembangan agribisnis. Bank Dunia menyebutkan bahwa selayaknya agribisnis dan agroindustri diberi bunga

lebih kecil dari 12 persen. Apabila agribisnis dan agroindustri diberikan bunga di atas 12 persen maka tidak layak. Misalnya, rata-rata bank umum di dalam negeri biasanya memberikan di atas 12 persen. Oleh karena itu dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri di dalam negeri pembentukan bank khusus untuk pertanian sangat tepat. Bank pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di bidang pertanian khususnya agribisnis dan agroindustri. Misalkan, Thailand memiliki *Bank of Agriculture*, yaitu bank khusus untuk pertanian dan koperasi. Bank memaklumi bahwa pertanian sangat tergantung pada kondisi alam sehingga dalam memberikan kredit bank sudah memperhitungkan resiko dari kegiatan pertanian.

Untuk mengembangkan sektor pertanian bantuan melalui subsidi sangat penting. Sebaiknya subsidi diberikan agar lebih efisien. Subsidi melalui perbankan inilah yang dapat diharapkan dapat dikembangkan, yaitu subsidi yang diwujudkan dalam bentuk kredit kepada petani atau pengusaha agribisnis dan agroindustri.

Chili mempunyai *Foundation of Chili*, yaitu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung swasta dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, latihan dan informasi pasar. Dana untuk kegiatan badan ini dihimpun dari perusahaan dan pemerintah. Hasilnya dalam tempo 17 tahun Chili berubah dari negara pengimpor buah dan sayur, menjadi negara pengekspor buah-buahan dan sayuran.

Pengembangan agribisnis bukan saja merupakan kepentingan sektor pertanian akan tetapi sektor lainnya. Pendekatan yang selama ini ditekankan untuk meningkatkan daya saing menghadapi pasar global melalui efisiensi di berbagai bidang merupakan langkah terbaik. Akan tetapi dalam kenyataannya, dukungan tersebut tidak sejalan dengan insentif pengembangan yang dilakukan oleh perbankan. Kredit penyaluran perbankan dibanding sektor lainnya merupakan jumlah terkecil.

A.2. Penanaman Modal

Lembaga yang menangani adalah Departemen terkait dengan bidang usaha masing-masing dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Prosedur penanaman modal telah disusun oleh masing-masing Departemen terkait dan BKPM. Selain itu terdapat pula suatu daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dan bidang usaha yang dicadangkan bagi golongan ekonomi lemah. Dari berbagai peraturan dan perundangan penanaman modal yang ada, 75 persen lebih bersifat

regulating, sedangkan yang bersifat *facilitating* hanya 25 persen. Penanaman modal Asing menurut sektor dapat dilihat pada tabel 1

A.3. Komisi Kerja

Terbentuknya komisi kerja tetap Departemen Pertanian –Diperindag di tingkat pusat yang melakukan penyerasian rencana pengembangan agroindustri melalui identifikasi peluang usaha secara terpadu menurut wilayah dan jenis komoditas. Di tingkat daerah, seluruh kanwil Departemen Pertanian dan Diperindag bertugas sebagai unsur pembina pelaksana pengembangan agribisnis di wilayah masing-masing di bawah koordinasi Gubernur.

Tabel 1. Proyek-Proyek Penanaman Modal Luar Negeri Yang Telah Disetujui Pemerintah Menurut Sektor Ekonomi. (Juta/Million US \$)

Sektor Ekonomi	2000	2001	2002	2003	2004
	Investasi	Investasi	Investasi	Investasi	Investasi
1	2	3	4	5	6
1. Pertanian:	536,2	392,0	458,9	178,9	37,7
a. Pertanian	480,2	283,9	446,3	57,2	29,0
b. Kehutanan	6,5	101,2	8,6	95,2	-
c. Perikanan	49,5	6,9	4,0	26,5	8,7
2. Pertambangan dan penggalian	58,6	119,7	49,3	17,8	13,1
3. Perindustrian	10760,1	5148,3	3252,6	6457,4	1364,3
4. Listrik, Gas, Air	1,2	37,3	90,2	362,9	-
5. Kostruksi	194,9	47,6	282,1	787,7	289,8
6. Perdagangan besar dan eceran, restoran dan hotel	2258,6	7232,6	1130,5	952,3	540,6
7. Transpot, Pergudangan dan Perhubungan	1163,4	376,4	3713,3	4160,2	19,2
8. Lembaga Keuangan, Perasuransian, Real estate	174,7	177,5	7,3	10,3	6,4
9. Jasa Masyarakat, social dan perorangan	928,2	1524,5	804,9	279,7	29,3
JUMLAH/TOTAL	16075,9	15055,9	9789,1	13207,2	2300,4

Sumber: BPS 2004

A.4. Penelitian

Di bidang penelitian dan pengembangan agribisnis, ditunjang oleh Badan Penelitian dan Pengembangan yang terdapat di tiap Departemen, yaitu Departemen Pertanian Departemen Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi dan lembaga-lembaga non departemen, misalnya BPPT, LIPI, AP3I, serta lembaga swasta lainnya. Selain itu terdapat kebijakan penunjang penelitian dan pengembangan yaitu disisihkannya 5 persen dari keuntungan BUMN setelah dipotong pajak, untuk biaya penelitian dan pengembangan, terutama untuk mengembangkan agroindustri berskala kecil.

A.5. Di sub sistem pemasaran.

Sub sistem pemasaran, terdapat beberapa ketentuan antara lain: (a) pendaftaran eksportir dan importir, (b) barang-barang yang dilarang ekspornya, (c) barang-barang yang diatur tataniaganya, (d) barang-barang yang diawasi ekspornya, (e) barang-barang yang ditetapkan harga patokannya, (f) barang-barang yang dilarang impornya, (g) negara-negara yang dilarang sebagai tujuan ekspor, (h) ketentuan kontrak dan syarat-syarat penjualan, (g) standar produk, (j) surat keterangan mutu, (k) pengurusan dokumen, (l) bea dan cukai dan (m) pengapalan/angkutan.

A.6. Perusahaan Inti Rakyat

Ditetapkannya pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dalam pengembangan agribisnis. Dalam pola PIR terdapat perusahaan inti yang membangun usaha dan fasilitas petani plasma, mengolah dan memasarkan hasil produksi petani plasma. Petani plasma berkewajiban mengelola usahanya dengan sebaik-baiknya, menjual hasil kepada perusahaan inti, dan membayar hutang yang telah dibebankan kepadanya. Pola PIR telah diterapkan dalam pengembangan perkebunan, persusuan, perunggasan dan perikanan (tambak udang). Hampir serupa dengan polaPIR adalah pola Bapak Angkat yang saat ini sedang dicoba untuk diterapkan untuk pengembangan agroindustri skala kecil. Dalam pelaksanaannya pola PIR banyak mengalami hambatan terutama hambatan non teknis.

B. Aspek Sosial Ekonomi Kelembagaan Agribisnis

Mengingat banyaknya kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan agribisnis, maka pembahasannya dibatasi mengenai aspek sosial

ekonomi dari pelaku-pelaku agribisnis, aspek sosial ekonomi pola PIR/Bapak Angkat, dan aspek sosial ekonomi kebijakan pemasaran agribisnis.

B.1. Aspek sosial Ekonomi Pelaku Agribisnis

Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat subsistem, antara lain: (1) industri hulu, yaitu industri yang memproduksi alat-alat pertanian, misalnya traktor, mesin pertanian, pupuk, pestisida dan sebagainya, (2) usahatani, yaitu kegiatan yang mengatur pola tanam, intensifikasi atau kegiatan primer, (3) kegiatan sekunder, yaitu kegiatan pengolahan dan industri, (4) kegiatan tersier, yaitu kegiatan pemasaran dan penjualan.

Pada setiap sub sistem agribisnis terdapat pelaku-pelaku yang pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 3 pelaku utama yaitu: (1) swasta, (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan (3) koperasi.

Berdasarkan segi positif dan negatifnya, kegiatan primer berupa input bahan baku dalam praktek pertanian posisinya selalu untung karena output produksinya jelas. Namun apabila iklim dan hama mempengaruhi usahatannya, maka dilihat dari segi petani selalu rugi. Sedangkan segi pengolahan dan pemasaran selalu untung. Apabila omset suatu industri naik, maka keuntungannya akan lebih tinggi dan biaya produksinya akan turun. Sedangkan petani biasanya dalam posisi terjepit. Untuk melindungi petani maka pemerintah turun tangan dengan mengeluarkan kebijaksanaan dalam bentuk subsidi.

Ditinjau dari ketiga pelaku utama biasanya digolongkan lagi dalam dua golongan yaitu golongan lemah yang terdiri dari petani, perusahaan kecil dan koperasi. Dalam golongan kuat termasuk BUMN dan konglomerat yang merupakan perusahaan terpadu. Sistem agribisnis disajikan dalam diagram 1.

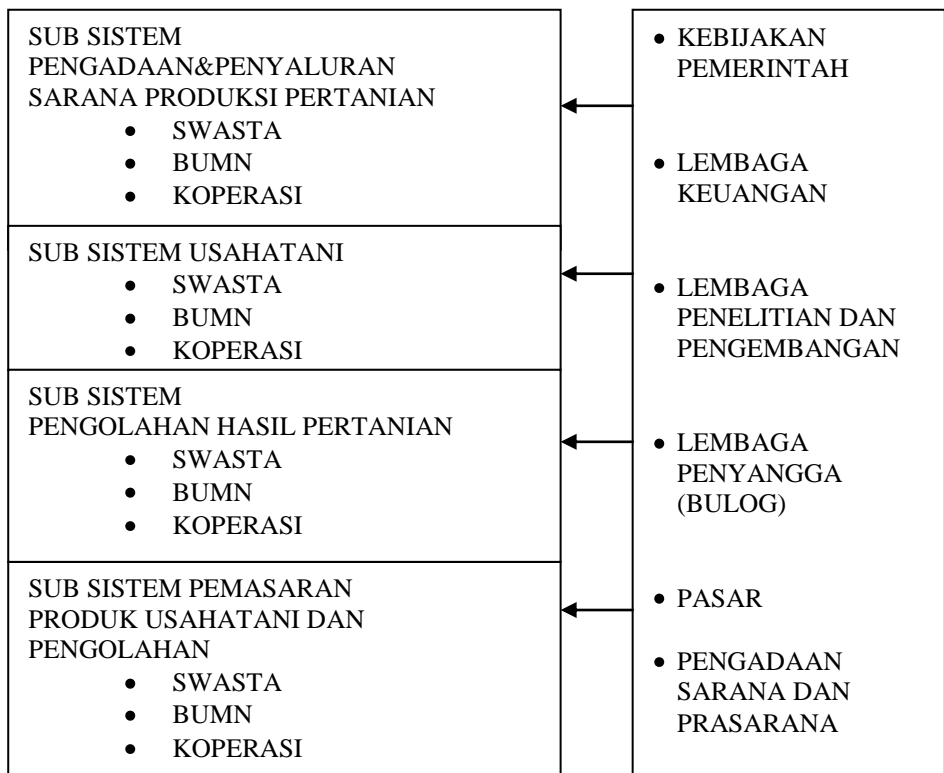
Pihak swasta baik individu maupun perusahaan yang berbadan hukum secara total merupakan pihak yang berperan paling besar dalam kegiatan agribisnis. Peran BUMN dalam kegiatan agribisnis lebih kecil dibandingkan dengan peran swasta. Peranan yang paling menonjol diantara keempat sub sistem agribisnis adalah di subsistem usahatani terutama dalam memproduksi komoditas perkebunan. Di subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, peranan yang paling menonjol adalah dalam memproduksi pupuk organik.

Dalam hal pengadaan sarana produksi lainnya yaitu alat pertanian, pestisida dan makanan ternak, pihak swasta ternyata berperan lebih besar.

Pelaku lainnya dalam kegiatan agribisnis adalah koperasi. Peranan koperasi di setiap subsistem agribisnis sangat kecil dibandingkan swasta dan BUMN. Untuk masa yang akan datang tugas KUD diharapkan tidak seperti sekarang. Kini tugas KUD masih dalam penyaluran pupuk, pestisida penyediaan fasilitas kredit, membeli hasil panen petani dan memasarkan. Koperasi lebih mirip sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Kebijakan pembinaan KUD sendiri membuat dirinya menjadi tergantung pada pemerintah, mulai dari penyediaan, pembiayaan bahkan rekayasa kegiatannya.

SISTEM AGRIBISNIS

PENUNJANG



Gambar 1. Diagram Sistem Agribisnis

B.2. Perusahaan Inti Rakyat

Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dilandasi pemikiran untuk memanfaatkan kondisi "economic of scale" Integritas manajemen disertai dengan proses transfer teknologi tinggi ke petani plasma yang kemampuan teknologinya rendah. PIR secara konseptual ditujukan untuk mewujudkan kombinasi efisiensi dan pemerataan.

Pola PIR masih harus terus dikoreksi karena banyaknya kendala yang membatasi perkembangannya baik menyangkut inti dan plasma. Sebagai salah satu contoh tidak seimbang informasi pasar karena lemahnya infrastruktur mulai dari sentra produksi hingga ke sentra pasar komersial mengakibatkan kesenjangan ekonomi. Hal demikian disebabkan karena berbagai kemudahan yang ditawarkan pemerintah "tersumbat" dan lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan besar, sementara perolehan petani tidak banyak mengalami perubahan berarti. Ketimbangan ini juga diakibatkan oleh makin longgarnya keterkaitan industri hulu dan hilir. Kenyataan demikian digambarkan oleh tingginya angka retention index sebesar 0,71 (Chrisman. S 1995). Hal ini berarti bahwa sebanyak 71 persen dari produk pertanian tertahan di sektor produksi dan hanya 29 persen yang masuk dalam industri pengolahan (agroindustri) untuk menghasilkan nilai tambah.

B.3. Aspek Sosial Ekonomi Kebijakan Pemasaran

Pada dasarnya potensi agribisnis di Indonesia cukup cerah. Produk-produk agribisnis ditujukan untuk pemasaran dalam negeri maupun pasar luar negeri. Untuk masing-masing produk kebijakan yang diambil berlainan, dalam pemasaran terdapat beberapa ketentuan antara lain pendaftaran eksportir dan importir, barang-barang yang dilarang ekspornya, barang-barang yang diatur tataniaganya, barang-barang yang diawasi ekspornya, barang-barang yang ditetapkan harga patokannya, negara-negara yang dilarang menjadi tujuan ekspor, ketentuan kontrak dan syarat-syarat penjualan, standar produk, surat keterangan mutu, pengurusan dokumen, bea dan cukai dan pengapalan/angkutan.

Begitu panjang rantai pemasaran dari produsen agar produk sampai ke konsumen melewati banyak lembaga dari tempat penyimpanan, transportasi, bongkar muat, pedagang besar, pengecer, konsumen. Hal ini mengakibatkan biaya pemasaran menjadi tinggi, sehingga produk menjadi mahal sampai ke tangan konsumen. Tingginya harga akan mengurangi daya saing produk tersebut di pasaran.

Tanpa mempertentangkan antara prinsip "ekonomi pasar" dengan "intervensi pemerintah" sektor pertanian Indonesia masih memerlukan

perlindungan pemerintah menghadapi pelaku bisnis kuat dan pasar bebas. Dalam kaitan ini, campur tangan pemerintah tersebut tidak selalu harus ditujukan untuk mensubsidi atau melindungi komoditas pertanian terhadap pesaing-pesaing baru baik komoditas yang sama maupun sejenis.

Penaan berbagai jenis retribusi terhadap komoditas pertanian di berbagai daerah tergolong salah satu kebijakan yang perlu dievaluasi. Beberapa pengusaha ekspor mengakui bahwa deregulasi yang diluncurkan pemerintah di bidang perdagangan belum menyeluruh, sehingga biaya untuk mengekspor maupun mengimpor barang relatif masih tinggi. Perkiraan sementara membengkaknya biaya pengurusan dokumen ekspor disebabkan banyaknya pihak maupun instansi yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Kesimpulan

Membicarakan kelembagaan dalam agribisnis tidak lepas dari campur tangan pemerintah sebagai komponen penunjang. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondusif melalui pembenahan kelembagaan dan pembangunan infrastruktur agar sektor agribisnis mampu bersaing di pasar domestik dan ekspor. Hal tersebut makin memperkuat pendapat bahwa komersialisasi di bidang agribisnis tidak atau sulit dapat diharapkan berkembang dan tumbuh tanpa melibatkan peran serta pemerintah.

Pemikiran diatas cukup relevan untuk dikaji terutama menyangkut tahapan pembangunan dan peran sektoral. Dalam berbagai hal, jika sektor swasta tidak terangsang untuk melakukan investasi di bidang agribisnis, sebagai pioner sektor pemerintah harus mengambil alih sebagai investor perintis. Setelah mencapai tahap pengembangan tertentu, kegiatan tersebut dapat dialihkan kepada koperasi bekerjasama dengan swasta.

Saran

Untuk menumbuh kembangkan agribisnis yang begitu kompleks begitu banyak lembaga yang terkait perlu upaya-upaya yang harus dilakukan. Sebaiknya dalam mengembangkan agribisnis sekaligus agroindustrialisasinya tidak dilakukan secara terkotak-kotak.

Sistem kemitraan antara pelaku agribisnis juga sangat tergantung etikanya. Apabila kemitraan ini murni dari hati nurani kedua belah pihak tentunya sampai kapanpun etika baik itu akan tetap tegar dan

berjalan. Namun apabila kemitraan itu hanya sekedar untuk memenuhi himbauan saja maka dikhawatirkan tidak berjalan dengan baik.

Pergeseran persepsi, dimana persepsi menumbuhkembangkan agribisnis selain sebagai kekuatan ekonomi nasional hendaknya dilihat sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi nasional secara keseluruhan. Pemikiran demikian perlu dikembangkan sehingga pembangunan agribisnis sifatnya melembaga.

Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan agribisnis diperlukan kelembagaan koordinasi yang dapat menggerakkan seluruh kelembagaan pelaku agribisnis. Dengan demikian kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan pembinaan dapat dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul. 2003. "*Dekomposisi Pertumbuhan Pertanian Indonesia*" Makalah pada Seminar Khusus Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Departemen Pertanian, 14 Nopember 2003 di Bogor.
- Arifin. Bustanul, 2005. *Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik, 2004. *Indikator Ekonomi*, BPS. Jakarta
- Jatileksono, Tumari, 1995, *Peran Agribisnis Dalam Proses Pembangunan Pertanian*, pangan No.24 Vol.VI, 1995, Jakarta.
- M.P. Todaro. 1995, *Economic Development in the Third World*, Logman, New York.
- Papanek, Henriot dan Lisk dalam M.P. Todaro. 1983. *The Struggle for Economic Development Reading in Problem and Policies*. Logman, New York.
- Silitonga, Chrisman, 1995, *Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pengembangan Agribisnis*, Pangan No. 24 Vol. VI, 1995, Jakarta.

Sri Wahyuningsih

Pengembangan Agribisnis.

Suryana, Adhmad, 1995, *Perencanaan Nasional Dalam Pengembangan Agribisnis Di Indonesia*, Pangan No.24 Vol. V, 1995, Jakarta.

Tjokronegoro, T.D., 1995, *Beberapa Upaya Dalam Pengembangan Agribisnis*, Pangan No.24 Vol. VI, 1995, Jakarta.